

**ANALISIS BERITA POLITIK PADA SURAT KABAR HARIAN (SKH)  
KEDAULATAN RAKYAT TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA  
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK**

Ririn Risnawati

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)  
Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)**  
[rinrisnawati@gmail.com](mailto:ririnrisnawati@gmail.com) / [rin.risnawati@umc.ac.id](mailto:ririn.risnawati@umc.ac.id)

**ABSTRACT**

This study examines the Political News Analysis of the Sovereignty of the People's Sovereignty on Eradicating Corruption as the Independence of the Mass Media in Proclaiming the Performance of the Jokowi-JK Government which focuses on 1 year of its administration (20 October 2014 October 20 2015). This research is based on two things, namely: first, how is the analysis of the political news regarding Corruption Eradication in the local mass media (Kedaulatan Rakyat) in reporting on the performance of the Jokowi-JK government; second, how the independence of the local mass media in reporting on the performance of the Jokowi-JK government in the area of corruption eradication. Media independence is seen from the method of Qualitative Approach with Critical Paradigm namely Critical Discourse Analysis; using Teun A. van Dijk's Model Analysis of text production involving aspects of cognition and social context. The production of text in the political news regarding the Eradication of Corruption in Judging the Performance of the Jokowi-JK Government presented by the Kedaulatan Rakyat SKH is a strong text structure. The Kedaulatan Rakyat Daily Newspaper is able to provide detailed Semantic Structure and more coherent relationships between words / sentences. In addition, the Kedaulatan Rakyat Daily Newspaper minimizes graphics and metaphor as rhetorical elements so as to be able to present more real and factual news. starting from text, social cognition and social context. The news on SKH Kedaulatan Rakyat is able to present the factual news objectivity in accordance with the truth and relevance. Not only that, the objectivity of the news about justice is able to be fulfilled by the People's Sovereignty SKH by presenting balanced news and explaining it more neutral without the support of the mass media.

**Keywords:** Political News, Independence, Mass Media, Eradication of Corruption

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji Analisis Berita Politik SKH Kedaulatan Rakyat mengenai Pemberantasan Korupsi sebagai Independensi Media Massa dalam Memberitakan Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang memfokuskan berita pada 1 tahun pemerintahannya (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015). Penelitian ini berkenaan dua hal, yaitu: *pertama*, bagaimana analisis berita politik mengenai Pemberantasan Korupsi di media massa lokal (Kedaulatan Rakyat) dalam memberitakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK; *kedua*, bagaimana independensi media massa lokal tersebut dalam memberitakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK bidang pemberantasan korupsi. Independensi media tersebut dilihat dari metode Pendekatan Kualitatif dengan

Paradigma Kritis yaitu Analisis Wacana Kritis; dengan menggunakan Analisis Model Teun A. van Dijk mengenai produksi teks yang melibatkan aspek kognisi dan konteks sosial.

Produksi teks dalam berita politik mengenai Pemberantasan Korupsi dalam Membritakan Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang disajikan SKH Kedaulatan Rakyat secara struktur teks kuat. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat mampu memberikan Struktur Semantik mendetail dan hubungan antar kata/kalimat yang lebih koheren. Selain itu Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat meminimalisir grafis dan metafora sebagai unsur retorik sehingga mampu menyajikan berita yang lebih nyata dan faktual. mulai dari teks, kognisi sosial dan secara konteks sosial. Berita di SKH Kedaulatan Rakyat mampu menghadirkan objektifitas berita yang faktual sesuai dengan kebenaran dan relevansinya. Tidak hanya itu, objektifitas berita mengenai keadilan mampu dipenuhi SKH Kedaulatan Rakyat dengan menyajikan berita yang berimbang dan menjelaskannya lebih netral tanpa keberpihakan media massa.

***Kata Kunci: Berita Politik, Independensi, Media Massa, Pemberantasan Korupsi***

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media massa memegang peran sangat penting dalam kehidupan politik nasional dan politik lokal. Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik melalui berita politiknya sering memberi dampak signifikan bagi perkembangan politik, bahkan media menentukan warna dan arah demokratisasi politik di Indonesia. Dalam hal ini media massa bukan saja sebagai sumber informasi politik, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong (*trigger*) terjadinya perubahan politik di masyarakat. Peranan media yang sangat besar tersebut harus didorong dengan berbagai kebijakan pemerintah yang demokratis dan tentunya internal media yang harus independen terhadap berbagai kepentingan politik praktis, independensi media massa ini harus terjaga agar demokratisasi lebih terarah dan lebih baik, serta tidak teracuni oleh kepentingan politik praktis.

Salah satu berita politik yang menarik adalah berita kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama satu tahun (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015). Komitmen Jokowi-JK ini menarik karena pada saat Pilpres 2014, Jokowi-JK telah menyematkan janji pada saat kampanye bahwa jika terpilih akan melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Menurut Jokowi-JK bahwa kejahatan korupsi dapat merusak tatanan sosial, budaya, ekonomi, bahkan demokrasi. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro

pemberantasan korupsi, memperkuat posisi KPK, Polri dan lembaga lainnya, dan terutama mendukung kinerja KPK.

Namun faktanya, komitmen Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas janji-janji belaka, sebab kinerja Jokowi-JK menuai badai dan tidak menunjukkan arah pemberantasan korupsi yang baik. Fakta kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi diawali dengan berbagai fakta, yaitu: dipilihnya BG yang terindikasi kasus korupsi menjadi calon tunggal Kapolri, padahal BG sudah mendapatkan raport merah dari KPK, ketidaktegasan Jokowi dalam konflik KPK vs Polri jilid II, kriminalisasi komisioner KPK, wacana pelanggaran pemberian remisi terpidana korupsi, dan lainnya. Fakta-fakta tersebut yang menyebabkan penilaian dari sebagian besar masyarakat bahwa Jokowi-JK kurang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Berita-berita tentang fakta kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi tersebut tentu menjadi berita politik paling menarik bagi media massa lokal, seperti SKH Kedaulatan Rakyat. Antara satu media massa dengan media massa lainnya memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat berbagai fakta tersebut, sekalipun terkadang faktanya bahwa independensi pemberitaan merupakan kiblat media yang tidak pernah lurus, ketidaklurusan tersebut tentunya disebabkan suguhan berita yang sesuai dengan warna ideologi maupun kepentingan politik media atau bahkan warna kepentingan politik pemilik media. Idealnya media massa memiliki semangat pemberantasan korupsi, sebab media memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam mengarahkan cara pandang masyarakat.

Berdasar pada ilustrasi latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengkaji masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Berita Politik SKH Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK bidang pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana independensi SKH Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK bidang pemberantasan korupsi?

## **B. Tinjauan Pustaka**

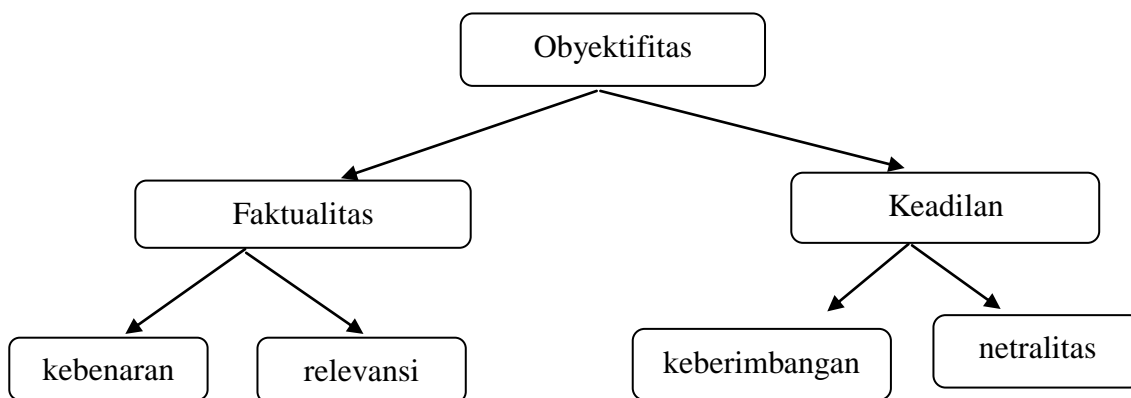
### **1) Media Massa dan Berita Politik**

Media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan sinar yang menerangi dunia, atau menyampaikan pesan yang merasuk ke dalam kalbu umat manusia, hingga memberi pencerahan. Dengan begitu media massa seolah memiliki posisi di luar kehidupan masyarakat. Media massa juga dianggap memiliki keunggulan yang menyebabkan mampu mempengaruhi alam pikiran khalayak, yang selanjutnya akan mengubah masyarakat (Siregar, 2000:171). Namun disisi lain media juga merupakan suatu alat komunikasi, yang hasilnya terlihat pada isi media yang dikemas dalam bentuk pemberitaan, sehingga mampu mempengaruhi khalayak, jadi dapat memberi implikasi pada perubahan-perubahan baik itu bersifat internal maupun eksternal (Bungin, 2006: 316).

Pers (media massa) adalah industri yang unik. Terlepas dari aspek bisnis yang melekat dalam kata “industri”, media massa juga mempunyai sebuah tanggung jawab besar terhadap khalayak yang menjadi konsumennya, lebih jauh lagi media mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya memberikan informasi secara obyektif namun harus memberi kontribusi moral terhadap masyarakat (Aloliliweri, 2011:876).

Dalam pemberitaannya, media massa haruslah obyektif. Obyektivitas secara teoritis adalah konsep utama bagi media dalam menyediakan kualitas informasi. Kriteria obyektivitas oleh Westerstahl dalam McQuail (2005 : 211) dinyatakan sebagai berikut:

Gambar 1. Kriteria Obyektivitas Kualitas Informasi Pemberitaan



Sumber: Westerstahl dalam McQuail, 2005 hlm. 211

- ✓ Faktualitas adalah bentuk pelaporan peristiwa dan pernyataan yang dapat dicek ke sumber dan ditampilkan bebas ataupun terpisah dari komentar. Faktualitas juga berisi kriteria kebenaran yaitu kelengkapan laporan,

akurasi dan niat untuk tidak menyesatkan atau menekan apa yang relevan (itikad baik).

- ✓ Aspek kedua dari faktualitas adalah relevansi, yaitu proses seleksi atas apa yang signifikan bagi penerima dan atau masyarakat. Yang dimaksud dengan signifikan adalah apa yang paling cepat dan paling kuat mempengaruhi masyarakat.
- ✓ Keadilan berisi kriteria keberimbangan (kesetaraan atau proporsional waktu/ruang/ penekanan) dan netralitas. Elemen tambahan yang perlu untuk melengkapi bagan diatas yaitu keinformatifan; kualitas isi informasi yang dapat meningkatkan kesempatan untuk informasi yang disampaikan ke khalayak diperhatikan, dimengerti, diingat dan lainnya.

Media massa sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk menginformasi, menghibur, mendidik, dan mengontrol kebijakan pemerintah serta perilaku publik, untuk tetap menjalankan fungsinya tersebut dengan memberikan konten-konten yang bermanfaat sesuai dengan perundangan yang ada (*accuracy, actuality, diversity of content, diversity of voice, both side coverage*) tanpa harus mengabaikan pelayanan prima bagi pihak kapitalis yang dalam hal ini adalah *stakeholder* atau pemegang saham kepemilikan media.

Ketika ada informasi dari media massa yang diperoleh dari fakta yang terjadi di lingkungan sekitar kemudian disampaikan dalam bentuk penyiaran berita, maka salah satu bentuk penyiaran berita melalui pemberian pesan-pesan berita (*news*) tersebut dapat diterima bersama-sama oleh masyarakat (Vivian, 2008:7). Isu-isu realitas sosial yang akan dikonstruksi dan dimaknai dalam bentuk berita, serta isi pesan yang dipublikasikan, tentunya sangat tergantung pada kebijakan media massa, sebagai alat untuk memperkuat, serta memperluas fungsi dan beberapa kemampuan kecakapan (kemampuan berkomunikasi) manusia.

Dalam bahasa McLuhan bahwa media merupakan pesan/ berita itu sendiri (*the medium is the message*) (Griffin, 2000:315). Meminjam bahasa Lord Northcliffe bahwa '*news is anything out of ordinary*' dan dalam bahasa Walkley bahwa '*news is combined with the element of surprise*'. Lord Northcliffe memberikan ilustrasi, '*if a dog bites of man, that's not news; if a man bites a dog, that's news*' (kalo anjing menggigit orang, itu bukan berita; kalo orang menggigit anjing, itu baru berita) (Kusumanningrat,

2009:32)). Intinya secara sederhana berita merupakan laporan tentang sesuatu realitas yang ingin atau perlu diketahui oleh khalayak (Vivian, 2008:7).

Sementara itu, sebagai agen perubahan (*agent of change*) media massa menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. Sebuah media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan berita politik yang menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan sebaliknya. Merujuk pada pandangan Nimmo (2004:236) bahwa jumlah berita politik disajikan oleh media massa merupakan proses yang bertalian dengan hubungan antara penguasa dan media, yang penyajiannya kepada khalayak dalam bentuk urutan pilihan kebijakan dan dicapai dalam isi berita mengenai, mana yang harus disajikan terlebih dahulu, berapa banyak ruang dan waktu yang disediakan bagi masing-masing, dimana meletakkan masing-masing berita (halaman pada surat kabar).

Sehingga proses pembentukan berita yang rumit dan banyak faktor serta memiliki potensi yang tinggi serta kualitas dalam isi berita tersebut dan memiliki pengaruh di masyarakat akan menjadikan berita tersebut memiliki kontribusi yang besar, tidak hanya dari aspek kualitas namun implikasi dari berita tersebut bagi masyarakat.

Karena media massa ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penting ditengah masyarakat, dalam menjamin adanya *check and balance* dari berbagai kekuasaan, maka peranan media massa harus mampu melahirkan laporan-laporan valid berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Berita politik tersebut sangat menentukan arah demokrasi dan sistem perpolitikan di Indonesia, dalam arti bahwa upaya pemberantasan korupsi akan semakin baik jika di didukung pemberitaan media massa yang independen.

Independensi media adalah sebuah konsep yang sangat rumit. Secara umum independensi adalah ide bahwa wartawan harus bebas dari bentuk campur tangan apapun ketika menjalankan dan mempraktekan profesinya, sedangkan media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa.

McLuhan menyatakan bahwa media berfungsi sebagai kepanjangan indra manusia pada masing-masing era yaitu :

1. Era kesukuan : pada saat ini indra yang lebih banyak digunakan adalah pendengaran, penciuman dan perasa. Pada era ini yang paling diandalkan ialah pendengaran

2. Era tulisan : yang ditekankan pada saat ini adalah indra penglihatan yang ditandai dengan diperkenalkannya huruf abjad oleh karenanya mata menjadi indra yang dominan dalam berkomunikasi
3. Era cetak : ditandai dengan di temukannya mesin cetak untuk pertama kalinya dalam peradaban manusia dan awal revolusi industri. Era cetak akan menyimpan informasi yang bersifat permanen untuk membantu era tulisan yang selalu mengingat suatu hal;
4. Era elektronika : media elektronika memperluas persepsi orang melampaui batas-batas tempat dimana mereka berada pada setiap saat sehingga menciptakan desa global. Pada saat yang bersamaan sebagaimana media cetak, dan elektronok mampu menyimpan informasi dan karena sifatnya yang lebih cepat tersedia maka media elektronik dapat menciptakan ledakan informasi. (Morissan, Andy, Farid, 2010 ; 34)

Sehingga jelas media mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Media dijadikan sebagai salah satu referensi utama yang dapat mempengaruhi perilaku tiap individu. Sedangkan perspektif politik, menyatakan bahwa media merupakan institusi yang menyajikan informasi dengan membawa ideologi tertentu, dengan konstruksi wartawan dalam memberikan informasi kepada khalayak.

Setiap informasi yang masuk dalam bentuk pesan yang dikemas selanjutnya dikonstruksi media pastinya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu independensi selalu berkaitan erat dengan kebebasan pers, sedangkan ruang publik menjadi barometer sejauh mana partisipasi publik dalam ranah politik melalui media. Independensi bisa dikatakan momok bagi media masa kini. Sebagai institusi ekonomi, tidak dapat dipungkiri media menjadi alat bagi pemodal untuk meraih sesuatu hal yang maksimal dalam hal memberitakan kasus pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi.

Upaya yang perlu dijalankan untuk memperkuat independensi media yakni, dengan cara menjadikan media milik pemerintah atau yang dikendalikan oleh pemerintah milik swasta perlu dikembangkan, dengan sistem untuk mengembangkan keanekaragaman dalam pemilikan media, sehingga persaingan yang terjadi diantara media dapat mendorong berbagai prespektif tentang kebijakan publik dan membatasi kekuasaan politik konglomerat media, serta mampu menjadi penyeimbang baik dan sisi

kapitalis dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi yang dikemas dalam bentuk berita.

Ketika berita diartikan sebagai laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting untuk disajikan dalam pembacaan/ penulisan yang kemudian disampaikan ke publik.

Dalam perkembangannya teknologi komunikasi, globalisasi, liberalisasi, dan komersialisasi telah memunculkan pergeseran media massa tumbuh tidak hanya menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan tetapi telah menjadi kekuatan politik, ekonomi dan budaya. Pergeseran ini terjadi karena adanya para elit politik yang ingin meraup keuntungan materil dari perusahaan media dan juga adanya kebutuhan non-materil yang berusaha dia penuhi. Dengan adanya para penguasa elit politik dalam media membuat segala pemberitaan media itu sendiri bisa dikategorikan sebagai settingan dari para pemiliknya (Subiakto, 2012 : 105).

## **2) Media Massa dan Pemberantasan Korupsi**

Media massa dalam kegiatan jurnalistiknya meliput suatu peristiwa untuk dijadikan berita / informasi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada hakikatnya, berita itu sendiri merupakan laporan atas peristiwa. Laporan tersebut merupakan hasil dari mengonstruksi fakta menjadi berita (konstruksi realitas). Peristiwa yang dianggap memiliki nilai berita (*news value*) mengandung satu atau beberapa unsur, yakni *significance, magnitude, timeliness, proximity, prominence, dan human interest*.

Seiring dengan bergulirnya pemerintahan dari masa ke masa, upaya pemberantasan korupsi senantiasa ditingkatkan. Namun, permasalahan ini tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, akan tetapi isu ini bersifat multidimensional sehingga berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena korupsi merupakan permasalahan yang sulit dan kompleks, maka dibutuhkan peran media massa dalam membantu mengatasi permasalahan ini. Sehingga, mental korup dan praktik korupsi dapat diminimalisir. (Wijayanto & Zachrie, 2009). peranan media massa sangatlah diperlukan, melalui fungsinya untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan. Media massa dapat membangun *public opinion* agar terkontruksi untuk menyatakan perang terhadap korupsi.



Pengertian korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara, Menyalah gunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, kelompok delik penyuapan, kelompok delik penggelapan dalam jabatan, delik pemerasan dalam jabatan, delik yang berkaitan dengan pemborongan, dan delik gratifikasi.

Sedangkan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang (2012-2015) disebutkan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun menindak tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah/Pemda), legislatif, serta yudikatif Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali media massa.

Tanggungjawab media massa tersebut seiring dengan tugas pemberantasan korupsi, namun media massa memiliki ranah yang berbeda dalam pemberantasan korupsi, media massa melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai berita yang disajikan.

Independensi dan netralitas sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan mudah, kedua konsep tersebut masing-masing dapat didefinisikan. Independensi media berarti bahwa dalam memproduksi isi media tidak ada tekanan dari pihak lain. Independensi didefinisikan sebagai kemerdekaan yang dimiliki oleh ruang redaksi dalam memproduksi

berita. Selanjutnya, bila independensi lebih berkaitan dengan proses produksi berita, maka netralitas lebih berkaitan dengan apa yang muncul di dalam berita. Netralitas menunjukkan bahwa media tidak berpihak dalam menyampaikan berita.

Media harus independen dan tidak memihak, seperti dikemukakan oleh McQuail (2005:58), “media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasi bersifat profesional, terarah serta bebas nilai kepentingan”. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana media mampu bersikap independen, ketika dikaitkan dengan ideologi pemberitaan ideal lepas dari unsur kepentingan bisnis.

### 3) Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis tumbuh dari pandangan kaum kritis yang menolak pemisahan bahasa dan subjek pengguna seperti yang dipahami oleh kaum positivisme empiris. Point penting untuk mengkritisi kaum konstruktivis yang memahami subjek pengguna sebagai inti dalam menggunakan bahasa untuk menciptakan makna tertentu. Lebih dari itu, kaum kritis berpendapat bahwa produksi dan reproduksi makna tersebut tidak hanya berlangsung atas diri subjek saja, akan tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Analisis wacana ini memandang penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, artinya bahwa dalam penggunaan bahasa terdapat hubungan dialektis antara beberapa unsur seperti wacana, situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.

Penggunaan analisis wacana kritis ini diperuntukkan guna melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan transformasi sosial melalui *textual interrogation*. Selanjutnya menghubungkan hasil interogasi tersebut dengan konteks makro yang ada di luar teks, karena itu, kualitas analisis wacana kritis selalu dilihat dari kemampuannya meletakkan teks dalam konteks secara utuh (holistik dan kontekstual). Sehingga tahapan analisisnya melibatkan tahapan *multilevel analysis*, beberapa karakteristik yang mencirikan analisis wacana ini bahwa wacana diartikan sebagai sebuah tindakan (*action*), selalu disertai aspek konteks, dilatari dengan konteks historis, serta memuat kuasa dan ideologi (Eriyanto, 2002:7-14).

Pada prinsipnya bahwa wacana adalah tindakan atau hubungan interaksi yang bertujuan. Dalam pembentukan wacana tersebut tidak lepas dari konteks latar, situasi,

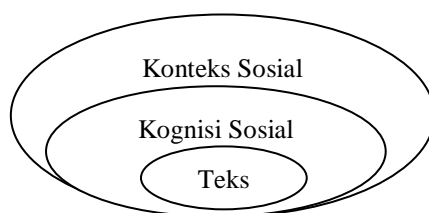
peristiwa, dan kondisi serta latar belakang subjek sebagai aktor. Guy Cook bahkan memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengatakan bahwa fokus dari analisis wacana tidak hanya pada bahasa tetapi juga pada konteks komunikasi. Siapa yang mengatakan dengan siapa dan mengapa, pada kondisi masyarakat dan situasi yang bagaimana, melalui medium apa, bagaimana perbedaan tipe komunikasi yang berkembang, dan hubungannya dengan pihak-pihak yang lain (Eriyanto, 2002:9).

Dengan kata lain, bahwa wacana merupakan gabungan antara teks dan konteks yang melingkupinya. Maka untuk memahami konteks ini, diperlukan pula konteks historis yang memberikan gambaran tentang situasi sosial pada saat teks diciptakan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah hubungan antara wacana dengan masyarakat, dimana selalu ada dominasi kuasa atas satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kuasa ini penting sebagai kontrol bagi kelompok dominan terhadap kelompok yang lain bertindak seperti yang diinginkannya. Wujud kontrol dapat berupa pemilihan nara sumber, jenis liputan dan bagaimana liputan itu harus ditampilkan. Pada gilirannya, kuasa ini pun dikendalikan oleh ideologi yang bekerja pada level kesadaran atau lebih tepatnya pada penciptaan “kesadaran palsu”.

Beberapa model analisis wacana kritis adalah model yang diperkenalkan oleh Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. van Dijk, dan Norman Fairclough. Model-model ini memperkenalkan tiga tingkatan analisis yaitu analisis mikro pada teks semata, analisis makro pada level struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta analisis meso pada level individu sebagai pihak memproduksi teks dan khalayak sebagai pihak konsumen teks. Meski model-model tersebut memiliki kesamaan seperti yang telah diuraikan di atas, namun juga memiliki titik perhatian yang berbeda. Fowler, van Leeuwen, dan Mills memusatkan perhatian pada keterkaitan teks pada analisis mikro dengan kekuatan sosial dan politik di masyarakat pada analisis makro. Van Dijk dan Fairclough melihat ada kesenjangan yang besar antara kedua level tersebut sehingga dibutuhkan mediasi. Pada titik ini Van Dijk menekankan pada struktur dan kesadaran mental, sementara Fairclough pada struktur dan praktek kerja media yang menyertakan kepentingan ekonomi politik pengelola. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan analisis wacana Teun Van Dijk.

Analisis wacana model Van Dijk terkait memahami teks sebagai hasil praktek produksi, untuk memahami sebuah teks harus mengetahui bagaimana teks itu diproduksi sehingga menghasilkan teks dengan perspektif tertentu. Proses produksi itu melibatkan kognisi sosial wartawan, mencakup dua hal: bagaimana proses produksi teks dilakukan oleh wartawan, dan bagaimana nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan yang akhirnya digunakan dalam memproduksi teks berita. Van Dijk menggambarkan wacana dengan tiga dimensi yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Skema 3. Dimensi Analisis Wacana Van Dijk  
(Eriyanto, 2002:225)



### 1. Teks

Dimensi teks menguraikan tentang strategi penggunaan teks dalam mengungkap makna. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap kejadian tertentu dan juga untuk menelisik strategi tekstual yang dipergunakan untuk memarjinalkan suatu ide, kelompok, atau peristiwa tertentu. Untuk itu van Dijk menawarkan enam struktur analisis teks yaitu struktur topik/tematis, skematis, semantik, sintaksis, stilistik dan struktur retorik (Sulhan, 2006 : 32). *Pertama*, topik/ tematis. Elemen ini menunjukkan gambaran umum teks berupa ide pokok yang memperlihatkan gagasan inti yang ingin disampaikan wartawan dalam pemberitaannya. Dalam hal ini, topik umum akan didukung oleh bagian teks lainnya berupa subtopik yang saling berkaitan, subtopik inipun kembali didukung oleh serangkaian fakta yang menunjuk pada subtopik sehingga membentuk teks yang utuh. *Kedua*, skematik tentang struktur penulisan berita. Elemen ini melihat kesesuaian antara *summary* (judul dan *lead*) dengan *story* (isi berita). Pentingnya elemen ini didasarkan pada keberadaan judul dan *lead* dalam berita yang menjadi pengantar masuk pada isi berita. *Ketiga*, struktur semantik yang meliputi latar (konteks peristiwa), detail peristiwa, dan maksud/*intention* (hubungan antarkata, proposisi dan kalimat). Ketiga elemen ini (latar, detil, dan maksud) merupakan cara wartawan dalam mengekspresikan sikap dan kecenderungan keberpihakannya.

*Keempat*, struktur sintaksis yang mengamati elemen koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Koherensi merupakan strategi untuk melihat keterkaitan peristiwa. Dengan menggunakan proposisi, peristiwa dapat digambarkan sebagai sesuatu yang terpisah, berhubungan, ataupun sebab akibat tergantung kepentingan wartawan. Proposisi yang biasa digunakan diantaranya, “mengakibatkan, di mana, akan tetapi, dibandingkan, dan lain sebagainya”. *Kelima*, stilistik berupa pilihan kata yang digunakan dalam teks berita yakni leksikon berupa pilihan kata. Pada kenyataannya suatu fakta dapat diutarakan dengan beberapa kata yang merujuk padanya. *Keenam*, retorik berupa penggunaan grafis dan metafora. Grafis menunjuk pada penggunaan huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, gambar, grafik, atau tabel pendukung. Penggunaan grafis menandakan bahwa bagian tersebut adalah penting bagi wartawan. Sementara metafora menunjuk pada kata kiasan, kalimat-kalimat pengandaian baik berupa idiom, pepatah, petuah kuno maupun kata-kata yang berasal dari domain wacana lain, untuk memberikan penekanan terhadap fakta dan dan asumsi yang dibuat.

Tabel 1. Elemen Teks Analisis Wacana van Dijk  
(Eriyanto, 2002: 228)

Wacana	Elemen	Hal yang diamati
Struktur Makro	Topik	Tema utama berita
Super Struktur	Skema	Urutan skema teks berita
Struktur Mikro	Latar, Detil, Maksud	Makna yang ditekankan dalam teks berita
Struktur Mikro	Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata ganti	Bentuk dan susunan kalimat yang dipilih
Struktur Mikro	Leksikon	Pilihan kata yang dipakai dalam teks berita
Struktur Mikro	Grafis, metafora	Cara penekanan dilakukan

## C. Metodologi Penelitian

### 1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis (analisis wacana kritis), dengan menggunakan analisis model Teun A. van Dijk. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang

dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan yang dapat menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Alasan pemilihan model analisis ini mengikut pada asumsi tentang dimensi kompleksitas tahapan model analisis yang ditawarkan, dibandingkan dengan model analisis wacana yang lain.

Dalam memandang wacana berita politik, van Dijk berpendapat bahwa produksi teks melibatkan aspek kognisi dan konteks sosial. Dengan kata lain bahwa analisis kognisi terhadap wartawan dan konteks sosial merupakan upaya validasi data teks. Jika demikian maka apa yang terrepresentasi dalam teks tidak lain adalah wujud dari cara pandang dan pemahaman wartawan terhadap suatu objek yang telah mendapat pengaruh dari wacana sosial. Di sinilah letak benang merah antara permasalahan penelitian yang ingin melihat konteks independensi media massa dalam memberitakan satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi.

## **2) Objek Penelitian**

Objek yang akan diteliti adalah berita politik mengenai pemberitaan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK bidang pemberantasan korupsi pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, artinya bahwa berita yang dipilih adalah berita politik edisi 20 Oktober 2014-20 Oktober 2015, misalnya berita politik Terpilihnya Budi Gunawan sebagai Calon Tunggal Kapolri, Kriminalisasi KPK Jilid Kedua, KPK vs Polri jilid II, Wacana Pelonggaran Pemberian Remisi Terpidana Korupsi, dan berita terkait pemberantasan korupsi lainnya.

## **3) Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa teks-teks berita pada media massa lokal Kedaulatan Rakyat. Sementara data sekunder berupa kajian literatur untuk melengkapi landasan teoritis terkait dengan permasalahan yang dibahas, data tersebut diambil dari beberapa literatur seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya.

## **4) Analisis Data**

Data akan dianalisis dengan menggunakan Model Analisis Wacana Teun A. van Dijk. Pada tahapan ini dilakukan analisis bagaimana independensi media massa lokal Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK

dalam pemberantasan korupsi. Tiga dimensi analisis wacana yang digunakan adalah dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks. Dimensi teks melibatkan struktur makro (topik), superstruktur/skema (judul, lead, dan isi berita), dan struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik). Sementara untuk kognisi sosial dilakukan dengan wawancara, serta melakukan kajian historis dan studi pustaka untuk melengkapi analisis konteks.

#### **D. Pembahasan**

##### **1) Program Jokowi-JK dalam Pemberantasan Korupsi**

Kinerja pemerintahan Jokowi dalam selama satu tahun (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2015) diawali dari gagasan *Nawa Cita* yang menjadi program andalan. Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas (*Nawa Cita*). Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan

- kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia;
  9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga;

Program *nawa cita*, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi dan penguatan kelembagaan lembaga pemberantas korupsi (KPK), pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama mengingat kasus korupsi semakin tumbuh subur di Indonesia. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi terbagi kedalam beberapa isu, (1) Pelantikan Jaksa Agung; (2) Pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri; (3) Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi UU KPK; (4) Seleksi Pimpinan KPK; (5) Penilaian 1 tahun kinerja Jokowi.

## 2) Analisis Wacana Pemberantasan Korupsi

Peran dan fungsi media massa yang diatur oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui peran tersebut media massa dapat melakukan kontrol sosial dengan monitoring terhadap aktivitas penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Sehingga jika terdapat indikasi praktik korupsi didalamnya, maka dapat terdeteksi oleh khalayak dan segera diatasi oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, media massa dapat melakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat maupun



penyelenggara pemerintahan, melalui penanaman nilai-nilai untuk berperilaku bersih dan anti korupsi. Dengan demikian, optimalisasi peran media massa sebagai lembaga pendidik dan kontrol sosial dapat secara efektif dan efisien mengurangi potensi berkembangnya permasalahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.

Kekuatan akan penguasaan informasi dan pembentukan wacana publik, tentunya membuat media massa begitu *powerful* dalam mengkonstruksi pandangan publik terhadap suatu isu tertentu. Begitu pun dengan permasalahan korupsi saat ini, tentunya menjadi salah satu masalah krusial yang harus segera dicari solusinya, sehingga upaya-upaya pencegahan masalah ini senantiasa terus ditingkatkan. Namun, peran lembaga hukum yang tidak hanya terfokus pada permasalahan korupsi, menjadikan penanganan masalah ini tidak sampai hingga ke akarnya. Dengan demikian, penggunaan media massa menjadi taktik jitu dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Melalui kebebasan pers yang menjunjung tinggi transparansi, maka monitoring media massa akan lebih tajam untuk menjaga iklim pemerintahan yang bersih dan anti-korupsi.

Namun dibalik potensi dan pengaruh besar media massa terhadap konstruksi publik, terdapat permasalahan krusial yang tentunya harus senantiasa diawasi, ditelaah dan dijaga yaitu terkait dengan independensi media. Peranannya yang begitu besar terlebih dalam konstruksi realitas, sangatlah dekat dengan unsur politis. Sehingga media massa akan sangat rentan dengan pengaruh kepentingan tertentu. Fenomena hari ini, ada beberapa pemilik media massa yang terjun ke dunia politik. Maka asumsinya, media tersebut akan lebih condong pada kepentingan pemiliknya, sehingga konten publikasinya pun akan lebih menguntungkan dan berpihak kepada kepentingan tertentu. Akan tetapi disamping itu, perlu dibangun kesamaan visi antarmedia massa agar ikut serta membangun bangsa dan negara sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia. Melalui komitmen utuh yang *concern* dalam menangani permasalahan korupsi, serta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat sehingga menjunjung tinggi kehidupan yang bersih dan anti-korupsi.

Mencermati pers dalam kendali pemerintah, secara esensial, khalayak terbiasa berada di lingkaran pemberitaan media massa yang datar tanpa gejolak. Pemerintah beserta sub-ordinat kekuatan politiknya, memperoleh perlindungan "manajemen pemberitaan pemerintah", sehingga merasa nyaman menghadapi terhadap pemberitaan

media. Secara esensial, paradigma penyebaran informasi, adalah otoritas pemegang kekuasaan yang bersifat politis. Tentu saja, jauh dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang memiliki kredibilitas memadai. Padahal dilihat dari fungsinya, media massa selayaknya mampu menggambarkan realitas faktual dalam sejumlah kasus korupsi yang merugikan rakyat dalam wujud pemberitaan korupsi yang transparan

Wacana pemberantasan korupsi memang menjadi isu yang menarik, namun hiruk pikuk pemberantasan korupsi terkadang membuat masyarakat kesal terhadap kebijakan Jokowi-JK yang dinilai kontroversial. Wacana yang akan ditelaah dalam kajian ini adalah pemberitaan pada Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dari edisi 20 Oktober 2014-20 Oktober 2015 (Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK). Beberapa wacana yang menarik untuk di telaah meliputi: (1) pemberitaan Pemilihan Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Jokowi; (2) pemberitaan mengenai Boedi Gunawan sebagai Calon Kapolri; (3) pemberitaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi; (4) pemberitaan mengenai Revisi Undang-undang KPK; (5) pemberitaan mengenai remisi bagi koruptor; (6) pemberitaan korupsi lainnya.

Enam pengelompokan pemberitaan korupsi tersebut akan dianalisis menggunakan analisis wacana model Van Dijk dengan memfokuskan pada teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

### **1. Struktur Teks**

Dimensi teks mengenai kinerja pemerintahan Jokowi – JK dalam pemberantasan korupsi menguraikan tentang strategi penggunaan teks dalam mengungkap makna dibalik berita kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap kejadian tertentu dan juga untuk menelisik strategi tekstual yang dipergunakan untuk memarjinalkan suatu ide, kelompok, atau peristiwa tertentu. Untuk itu, pemberitaan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi akan dianalisis dengan menggunakan enam struktur analisis teks, yaitu: struktur topik/tematis, skematis, semantik, sintaksis, stilistik dan struktur retorik.

*Pertama*, topik/ tematis pemberantasan korupsi. Elemen ini menunjukkan gambaran umum teks berupa ide pokok yang memperlihatkan gagasan inti yang ingin disampaikan dalam pemberitaannya. *Kedua*, skematik tentang struktur penulisan berita.

Elemen ini melihat kesesuaian antara *summary* (judul dan *lead*) dengan *story* (isi berita). *Ketiga*, struktur semantik yang meliputi latar (konteks peristiwa), detail peristiwa, dan maksud/*intention* (hubungan antarkata, proposisi dan kalimat). *Keempat*, struktur sintaksis yang mengamati elemen koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. *Kelima*, stilistik berupa pilihan kata yang digunakan dalam teks berita yakni leksikon berupa pilihan kata. *Keenam*, retorik berupa penggunaan grafis dan metafora.

a. Analisis Struktur Makro (Tematik)

Analisis struktur makro memuat tentang topik atau tema dominan pemberitaan. Analisis ini memberikan gambaran makna sentral dari teks dalam hal ini pemberitaan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi selama 1 tahun pemerintahannya.

**Tabel 1**  
**Analisis Struktur Makro**

SKH Kedaulatan Rakyat		
Isu	Edisi	Judul
Pelantikan Jaksa Agung	19 November 2014	Jaksa Agung dari Parpol: Integritas Prasetyo dipertanyakan
	22 November 2014	Jakgung Janji Tolak Intervensi: Jokowi harus jelaskan ke publik
	24 November 2014	Terpilihnya jakgung dinilai Politis: Jokowi diingatkan Independen
Pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri	12 Januari 2015	Soal Kapolri, ICW anggap Presiden Tutup Mata: Jenderal Sutarman Pasrah dan Siap Diganti
	13 Januari 2015	Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri: Presiden berunding di balik Hak Prerogatif
	13 Januari 2015	Soal Kapolri, Jokowi tunggu Paripurna: Abaikan KPK, DPR Loloskan Budi
	14 Januari 2015	Jokowi Terkejut, JK tak Komentar
	14 Januari 2015	Batalkan Pencalonan Kapolri
	16 Januari 2015	KPK ancam Tahan Budi Gunawan
	17 Januari 2015	Relawan Jokowi Ancam Oposisi
	17 Januari 2015	Tunda Lantik Budi Gunawan Kaplori: Jokowi Tunggu Proses Hukum KPK
	19 Januari 2015	Jokowi Jangan Nekat Lantik Budi
	29 Januari 2015	Rekomendasi Tim 9 Kepada Presiden Joko Widodo
	29 Januari 2015	Rekomendasi Tim Independen, Jangan Lantik Kaplori: Pengajuan BG Bukan Inisiatif Jokowi
	2 Februari 2015	9 Nama Pengganti BG
	2 Februari 2015	Tak Perlu Takut Dimakzulkan
	3 Februari 2015	BG Ubah Gugatan, KPK Tak Hadir
	4 Februari 2015	BG diminta Mundur
5 Februari 2015	Buya Pastikan Jokowi Tak Lantik BG	
14 Februari 2015	Pelantikan BG Simpang Siur	
17 Februari 2015	Jokowi diminta Lantik Kaplori	

	20 Februari 2015	Badrodin Calon Kapolri Gantikan BG: Janji Selesaikan Kemelut Polri - KPK
	16 April 2015	Calon Kapolri Badrodin Haiti, Siap: Hari ini “Fit and Proper Test”
	17 April 2015	DPR Setuju Badrodin Kapolri
	18 April 2015	Resmi Dilantik Jokowi: Badrodin Janji “Beck Up” KPK
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi UU KPK	24 Januari 2014	Penangkapan BW, Jokowi Didesak Turun Tangan: Dukungan ke KPK terus Menguat
	26 Januari 2015	Jokowi Tolak Kriminalisasi
	26 Januari 2015	Ratusan Akademisi Yogya Aksi Dukung KPK
	27 Januari 2015	BW Mundur, Tunggu Putusan Jokowi
	28 Januari 2015	Politisi PDIP Kritik Jokowi
	28 Januari 2015	Jokowi Belum Memutuskan
	29 Januari 2015	UGM Minta Jokowi Tegas dan Cepat
	29 Januari 2015	100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Rakyat Tagih Janji Kampanye
	4 Februari 2015	Jalani Pemeriksaan: BW Kooperatif
	10 Februari 2015	Presiden Bantah Tersandera
	11 Februari 2015	DPR Tagih Solusi Konflik KPK-Polri
	12 Februari 2015	Jokowi Akui Tak Bisa Cepat bertindak
	20 Februari 2015	3 PLT Pimpinan KPK Dilantik Hari Ini: Ditelpon Wapres, Diangkat Jokowi
	28 Februari 2015	Presiden diminta Hentikan Hiruk Pikuk: KPK fokus Pencegahan – Pemberantasan Korupsi
	11 Juni 2015	Presiden Tak Ingin Revisi UU KPK: Wapres Kewenangan Ada Batasnya
	20 Juni 2015	Presiden Tolak Revisi UU KPK
	8 Oktober 2015	Pro dan Kontra Revisi UU KPK
	9 Oktober 2015	Bola Ada di Tangan Presiden
	10 Oktober 2015	Penolakan Revisi UU KPK: Menkumham tak Ingin Heboh
	10 Oktober 2015	Jokowi Tak Ingin Pelemahan KPK
Tim Seleksi Pimpinan KPK	10 Juni 2015	TNI Usulkan Hendarji Pimpin KPK
	26 Mei 2015	Proaktif Identifikasi Tokoh Antikorupsi
	29 Mei 2015	Pansel Harus Hati-Hati Pilih Capim KPK
	31 MEI 2015	Pansel KPK Minta Masukan Masyarakat
	13 Juni 2015	Polri Ajukan Pimpinan KPK
	2 September 2015	Jumly Tak Masuk, Johan Budi Aman
Penilaian Kinerja 1 Tahun Jokowi - JK	21 Oktober 2015	Satu Tahun Jokowi-JK: Sultan, Kebijakan Tumpang Tindih

#### b. Analisis Superstruktur (Skematik) dan Analisis Struktur Mikro

Analisis ini memperhatikan skema kesesuaian antara judul, lead, isi berita dan juga penutup. Pentingnya analisis ini adalah untuk melihat bangunan tema pada satu pemberitaan yang bisa memberikan gambaran tentang makna tersembunyi dari teks. Sedangkan analisis struktur mikro memiliki kriteria beberapa unit analisis pada unsur ini adalah latar, detil, maksud, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis dan metafora.

Tabel 2.  
Contoh Analisis Super Struktur dan Analisis Struktur Mikro

## 1. Pelantikan Jaksa Agung

1	Judul	:	Terpilihnya Jakgung dinilai Politis: Jokowi diingatkan Independen
	Analisis Super Struktur		
	Teras	:	Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pemilihan Prasetyo sarat kepentingan politik
	Isi	:	Pengamat politik Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Jokowi untuk bersikap independen dan lebih memihak kepada rakyat serta mengesampingkan kepentingan parpol
	Penutup	:	Penutup tulisan ini menyajikan hal atau bentuk berita baru yang justru di luar tema judul dan teras tulisan.
	Analisis Struktur Mikro		
	Semantik		Pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo masih menandai kritik dari berbagai kalangan. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pemilihan Prasetyo sarat kepentingan politik. Selanjutnya, pak Jokowi mendekatlah pada rakyat, jangan pada partai, karena rakyatlah yang memenangkan anda, tutur Ray Rangkuti.
	Sintaktis		Sebelumnya Jokowi juga menunjuk kader partai politik pengusungnya untuk posisi yang amat penting secara hukum dan politik yakni yasonna H. Laoly sebagai menteri hukum dan HAM dan tjahjo kumolo sebagai mendagri. Tak lama setelah di lantik, lanjut Habiburohman kedua menteri tersebut langsung melakukan tindakan-tindakan yang diduga sangat bermotif kepentingan politik namun tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
	Stilistik		Ia menilai Prasetyo terpilih karena ada intervensi dari Ketua Nasdem Surya Paloh
	Retoris		Dia seperti bermesraan dan meninggalkan fraksi PDIP-PKB. Ke mana? Terlihat ada tensinya Jokowi kuat memilih JK dan Nasdem. Artinya kalau sampai masuk disini, dia tidak punya pegangan lagi. Dia tidak hanya berhadapan pada KMP di DPR, tetapi juga di internal partai pendukungnya, ucap Ray Rangkuti.

## 2. Pemilihan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

1	Judul	:	Soal Kapolri, ICW anggap Presiden Tutup Mata: Jenderal Sutarman Pasrah dan Siap Diganti
	Analisis Super Struktur		
	Teras	:	Presiden Jokowi telah menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri yang baru menggantikan jenderal Sutarman yang segera memasuki masa pensiun
	Isi	:	Kapolri Sutarman pasrah seandainya presiden Jokowi menggantinya segera. Dia mengaku siap melepas jabatannya. Sutarman tidak memperdulikan apakah dia diganti dalam waktu dekat atau menunggu hingga masa apensiun pada oktober 2015 nanti. Dia akan fokus menyelesaikan tugas yang dibebarkannya saat ini.
	Penutup	:	Penutup bergaya narasi yang diakhiri dengan kalimat bernada eksposif
	Analisis Struktur Mikro		
	Semantik		Nggak ada permasalahan soal rekening gendut, kalau ada pasti sudah di proses. lebih dulu di lingkungan internal Polri.
	Sintaktis		KPK dan PPATK juga tidak pernah menyebut Komjen Budi Gunawan bermasalah atas kepemilikan rekening gendut, semua sudah <i>clear dan clean</i> kata kepala divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny M Sompie.
	Stilistik		ICW menilai Presiden menutup mata dalam memilih calon kapolri selain itu kita nilai juga, sebagai skandal politik. Tegasnya sambil melakukan aksi dengan menutup mata menggunakan kain warna hitam bertuliskan kapolri.
	Retoris		Itu adalah hak prerogatif presiden, mau di perpendek atau mau di perpanjang mau diapun itu adalah kewenangan bapak Presiden

## 3. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi

1	Judul	:	Penangkapan BW, Jokowi Didesak Turun Tangan: Dukungan ke KPK terus Menguat
	Analisis Super Struktur		
	Teras	:	KPK protes keras atas penangkapan yang dilakukan bareskrim polri terhadap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.
	Isi	:	Terkait penangkapan bambang, banyak pihak berpendapat hal itu ada hubungannya dengan penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK.
	Penutup	:	Paragraf penutup dalam tulisan ini juga menampilkan gaya eksposisi
	Analisis Struktur Mikro		
	Semantik		KPK protes keras atas penangkapan yang dilakukan Bareskrim polri terhadap wakil ketua Bambang Widjojanto bahkan ketua KPK, Abraham Samad, menilai cara polri melakukan proses hukum terhadap Bambang sewenang wenang. Sementara dukungan terhadap lembaga anti korupsi ini terus menguat.
	Sintaktis		P Yang terjadi pada hari ini terhadap KPK adalah sebuah kezaliman. Ini yang tidak bisa di biarkan sama sekali, kata Abraham dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta. Meski menghadapi keadaan demikian, ia menuturkan tugas KPK memberantas korupsi akan terus berjalan. Samad meminta masyarakat yang [pro pemberantasan korupsi tetap memberikan dukungan terhadap KPK.
	Stilistik		Sebagai kepala negara saya meminta agar kapolri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing masing, kata Jokowi terhadap wartawan.
	Retoris		Jangan biarkan KPK di geruduk dan di kuasai oleh kaki tangan koruptor. Jangan biarkan Indonesia dikuasai mafia koruptor.

## 4. Tim Seleksi Pimpinan KPK

1	Judul	:	Proaktif Identifikasi Tokoh Antikorupsi
	Analisis Super Struktur		
	Teras	:	Argumentatif, teras berita ini tidak hanya mewakili isi berita namun juga menunjukkan gaya argumentatifnya
	Isi	:	Para Srikandi siap melaksanakan tugas untuk menjaring para pimpinan KPK dengan melakukan sebuah terobosan penyeleksian pimpinan KPK, dengan cara proaktif mengidentifikasi tokoh-tokoh anti korupsi
	Penutup	:	Deskriptif menyampaikan keinginan Tim Pansel kepada masyarakat
	Analisis Struktur Mikro		
	Semantik		Setelah didapuk sebagai Pansel Capim KPK, Para Srikandi siap melaksanakan tugas untuk menjaring para pimpinan KPK.
	Sintaktis		Akan melakukan sebuah terobosan penyeleksian pimpinan KPK, dengan cara proaktif mengidentifikasi tokoh-tokoh anti korupsi yang memenuhi kriteria agar mau mendaftar. Meskipun yang bersangkutan harus melalui seleksi tentunya.
	Stilistik		Tidak ada batasan calon-calon yang berlatar belakang Jaksa, Polisi untuk ikut seleksi, sepanjang memiliki kompetensi.
	Retoris		--

## 5. Penilaian Kinerja Satu Tahun Jokowi –JK

1	Judul	:	Satu Tahun Jokowi-JK: Sultan, Kebijakan Tumpang Tindih
	Analisis Super Struktur		
	Teras	:	Berita ini menjadikan beberapa pandangan mengenai kinerja Jokowi –Jk, baik dari Sultan dan ICW
	Isi	:	Penilaian terhadap kinerja Jokowi - JK
	Penutup	:	Deskriptif dan kritis
	Analisis Struktur Mikro		
	Semantik		Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK setahun terakhir, menurutnya kebijakan para pembantu Jokowi banyak yang tumpang tindih, sehingga membingungkan para pelaku kepentingan daerah.
	Sintaktis		Ditempat terpisah tim peneliti <i>Indonesian Corruption Watch</i> (ICW) Siti Juliantar mengatakan memberi rapor merah untuk kinerja satu haun Jokowi-Jk dalam pemberantasan korupsi
	Stilistik		Ada tujuh point yang disorot ICW, yaitu pembentukan kabinet yang transaksional, menunjuk politisi yang menjabat Menkumham dan jaksa agung, dan lemahnya penanganan kasus korupsi.
	Retoris		-

## 2. Kognisi Sosial

Analisis pemberitaan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dimensi Kognisi Sosial. Tahapan kognisi sosial adalah aspek makro berupa pemahaman tentang proses produksi teks yang melibatkan sisi pengetahuan, prasangka, dan kepercayaan sang *author*. Bagian ini menegaskan bahwa pemberitaan pemberantasan korupsi tidak memiliki maknanya sendiri akan tetapi menjadi bagian dari konstruksi sosial. Kognisi sosial ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana makna dari pemberitaan pemberantasan korupsi itu secara strategis dikonstruksi dan ditampilkan, selain itu untuk melihat pandangan wartawan dalam menuliskan pemberitaan pemberantasan korupsi.

**Tabel 4**  
**Contoh Analisis Kognisi Sosial**

Isu	Judul Berita	Skema			
		Person	Keadaan	Peran	Peristiwa
Pelantikan Jaksa Agung	Jaksa Agung dari Parpol: Integritas Prasetyo dipertanyakan	x	x	x	
	Jakgung Janji Tolak Intervensi: Jokowi harus jelaskan ke publik	x	x	x	
	Terpilihnya jakgung dinilai Politis: Jokowi diingatkan Independen	X	x	x	
Pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri	Soal Kapolri, ICW anggap Presiden Tutup Mata: Jenderal Sutarmn Pasrah dan Siap Diganti	x	x	x	
	Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri: Presiden berlindung di balik Hak Prerogatif	x	X	X	X
	Soal Kaplori, Jokowi tunggu Paripurna: Abaikan KPK, DPR Loloskan Budi		X	X	X
	Jokowi Terkejut, JK tak Komentar		X	X	X
	Batalkan Pencalonan Kapolri	x	X	X	X
	KPK ancam Tahan Budi Gunawan	x	X	X	X
	Relawan Jokowi Ancam Oposisi	x	X	X	
	Tunda Lantik Budi Gunawan Kaplori: Jokowi Tunggu Proses Hukum KPK	x	X		X
	Jokowi Jangan Nekat Lantik Budi	x	X		
	Rekomendasi Tim Independen, Jangan Lantik Kaplori: Pengajuan BG Bukan Inisiatif Jokowi	x	X	X	X
	9 Nama Pengganti BG	x	X	X	
	Tak Perlu Takut Dimakzulkan	x	X	X	
	BG Ubah Gugatan, KPK Tak Hadir	x	X	X	



	BG diminta Mundur	x	x	x	X
	Buya Pastikan Jokowi Tak Lantik BG	x	x	x	X
	Pelantikan BG Simpang Siur	x	x		X
	Jokowi diminta Lantik Kapolri	x	x		
	Badrodin Calon Kapolri Gantikan BG: Janji Selesaikan Kemelut Polri – KPK	x	x	x	X
	Calon Kaplori Badrodin Haiti, Siap: Hari ini “Fit and Proper Test”	x	x	x	X
	DPR Setuju Badrodin Kapolri	x	x	x	X
	Resmi Dilantik Jokowi: Badrodin Janji “Beck Up” KPK	x	x	x	X
Pelemahan Pimpinan KPK	Penangkapan BW, Jokowi Didesak Turun Tangan: Dukungan ke KPK terus Menguat	x	x	x	X
	Jokowi Tolak Kriminalisasi	x	x	x	X
	Ratusan Akademisi Yogya Aksi Dukung KPK	x	x	x	X
	BW Mundur, Tunggu Putusan Jokowi	x	x	x	X
	Politisi PDIP Kritik Jokowi	x	x	x	X
	Jokowi Belum Memutuskan	x	x	x	X
	UGM Minta Jokowi Tegas dan Cepat	x	x	x	X
	100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Rakyat Tagih Janji Kampanye	x	x	x	X
	Jalani Pemeriksaan: BW Kooperatif	x	x	x	X
	Presiden Bantah Tersandera	x	x	x	X
DPR Tagih Solusi Konflik KPK-Polri	x	x	x	x	

	Jokowi Akui Tak Bisa Cepat bertindak	x	x	x	x
	3 PLT Pimpinan KPK Dilantik Hari Ini: Ditelpon Wapres, Diangkat Jokowi	x	x	x	x
	Presiden diminta Hentikan Hiruk Pikuk: KPK fokus Pencegahan – Pemberantasan Korupsi	x	x	x	x
Seleksi Pimpinan KPK	TNI Usulkan Hendarji Pimpin KPK	x	x	x	x
	Proaktif Identifikasi Tokoh Antikorupsi	x	x	x	x
	Pansel Harus Hati-Hati Pilih Capim KPK	x	x	x	x
	Pansel KPK Minta Masukan Masyarakat	x	x	x	x
	Polri Ajukan Pimpinan KPK	x	x	x	x
	Jimly Tak Masuk, Johan Budi Aman	x	x	x	x
Penilaian Kinerja Pemerintahan Satu Tahun	Satu Tahun Jokowi-JK: Sultan, Kebijakan Tumpang Tindih	x	x	x	x

### **3. Konteks Sosial**

Analisis selanjutnya menggunakan pendekatan konteks sosial, analisis ini mengkaitkan pemberitaan pemberantasan korupsi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dalam arti melihat bangunan wacana yang berkembang di lingkungan masyarakat. Analisis ini sangat penting karena tidak terlepas dari konteks wacana yang berkembang di lingkungan masyarakat. Pencapaian analisis yang diinginkan pada tahapan ini adalah bagaimana wacana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mempengaruhi produksi dan reproduksi teks serta mempengaruhi kesadaran/kognisi sosial pembuat teks.

Analisis sosial melihat bagaimana pemberitaan kinerja pemberantasan korupsi itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Ini merupakan wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.

### **E. Kesimpulan**

Unsur-unsur Elemen Van Dijk ; mulai dari teks, kognisi sosial dan secara konteks sosial dalam Berita Politik mengenai Pemberantasan Korupsi sebagai Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam yang disajikan SKH Kedaulatan Rakyat dalam penelitian ini terpenuhi. Berita Politik dalam SKH Kedaulatan Rakyat mempunyai struktur teks yang kuat serta mampu memberikan Struktur Semantik yang lebih mendetail dan hubungan antar kata/kalimat yang lebih koheren. Selain itu SKH Kedaulatan Rakyat meminimalisir grafis dan metafora sebagai unsur retorik sehingga mampu menyajikan berita yang lebih nyata dan faktual. Kognisi sosial dalam Berita Politik SKH Kedaulatan Rakyat mampu dihadirkan dengan kriteria objektivitas berita yang faktual sesuai dengan kebenaran dan relevansinya. Tidak hanya itu, secara konteks sosial mengenai keadaan yang terjadi yaitu pemberantasan korupsi; mampu disajikan sesuai kriteria berita mengenai keadilan dan keberimbangan. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menyajikan berita yang berimbang dan menjelaskannya lebih netral tanpa keberpihakan sebagai independensi media massa.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Alatas. (1980). *The Sociology of Corruption*. Singapore: Time International.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto, (2000), *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS).
- , (2005), *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS).
- Griffin, Em., (2000), *A First at Communication Theory, Fourth Edition*, (New York: The Mcgraw-Hill Companies, Inc).
- Harry Susanto, Eko. 2010. *Komunikasi Manusia; Esensi dan Aplikasi Dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Henry Subiakto & Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, (Jakarta Kusumaningrat, Hikmat., dan Kusumaningrat, Purnama., (2009), *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Morissan, Dkk. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Susanto, Eko Harry.2006.” Meneropong Korupsi di Legislatif” dalam Surat Kabar Media Indonesia, Media Indonesia, 15 November2006.
- Susanto, Eko Harry.2007.” Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi” dalam opini Surat Kabar Jurnal Nasional, Jakarta, 14 April 2007
- Susanto, Eko Harry.2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Susanto, Eko Harry.2007.*Komunikasi Manusia :Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Rosdakarya.
- Vivian, John., (2008), *The Media of Mass Communication, 8<sup>th</sup> edition*, Triwibowo Bs (Jakarta: Prenada Media Group)
- Wijayanto, & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Undang – undang**

- Undang –Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia